

Yusnanda. A. D., Maskan., Ashari. M. I. R., Aswin. A (2026). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Program Makan Bergizi Gratis di SD Negeri 008 Kota Samarinda. *Prediksi*. Vol. 25 (2) 441-453.

Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Program Makan Bergizi Gratis di SD Negeri 008 Kota Samarinda

Alivia Debi Yusnanda^{1*}, Maskan², M. Ibnu Ashari. R³, Akbar Aswin⁴

^{1,2,3,4} Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email: ¹aliviadebiyusnanda@gmail.com, ²maskanabdulfatah@gmail.com, ³ibnuashario92@gmail.com,
⁴akbaraswin48@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

30 Mei 2026

Received in revised form:

29 Juni 2026

Accepted:

26 Juli 2026

Keyword:

Implementation, Public Policy,
Free Nutritious Meals

Kata Kunci:

Implementasi, Kebijakan
Publik, Makan Bergizi Gratis

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of government policies and analyze the supporting and inhibiting factors in the Free Nutritious Meal Program at SD Negeri 008 in Samarinda City. This study employs a descriptive qualitative research design. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation. The data were then analyzed using descriptive qualitative data analysis techniques, including data sorting, data presentation, and drawing conclusions from the data. The focus of this study is the implementation of government policy in the Free Nutritious Meal Program at SD Negeri 008 in Samarinda City, as determined by the following indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, as well as analyzing the supporting and hindering factors in its implementation. The research findings indicate that the implementation of government policy in the Free Nutritious Meals Program at SD Negeri 008 in Samarinda can be assessed based on the research focus. Communication efforts have been carried out effectively, but consistency still needs to be improved as challenges continue to arise. The available resources to support the program's implementation are sufficient, and the staff have demonstrated a positive attitude; as evidenced by the high commitment and full sense of responsibility demonstrated by the implementers toward the program. The bureaucratic structure has functioned effectively, supported by clear and simple Standard Operating Procedures (SOPs) that are strictly adhered to by the organizers. Supporting factors include good cooperation and coordination; the hindering factors observed were delays in distribution and a decline in food quality during the initial stages. However, regarding these hindering factors, it is evident that all challenges have been optimally addressed by the implementers; nevertheless, there remains a need to enhance the performance of the implementers in accordance with their primary duties and functions.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi kebijakan Pemerintah dan menganalisis Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Program Makan Bergizi Gratis di SD Negeri 008 Kota Samarinda. Jenis penelitian ini menggunakan Kualitatif Deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut kemudian di analisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif, memilah data, menyajikan data dan menarik kesimpulan pada data. Adapun fokus penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Program Makan Bergizi Gratis di SD Negeri 008 Kota Samarinda yang ditetapkan dengan indikator: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi serta menganalisis faktor Pendukung dan Penghambat dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Program Makan Bergizi Gratis di SD Negeri 008 Kota Samarinda dapat dilihat dari fokus penelitian yang ada, Komunikasi yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik tetapi masih perlu untuk lebih meningkatkan konsistensi karena masih dirasakan terdapat adanya kendala yang terjadi, Sumber Daya yang ada dalam mendukung pelaksanaan program ini sudah cukup memadai, Disposisi yang telah menunjukkan sikap positif, hal ini ditandai dengan adanya komitmen yang tinggi dan tanggung jawab yang penuh terhadap program yang diberikan oleh para pelaksana, Struktur Birokrasi yang telah berjalan secara efektif dengan adanya SOP yang jelas dan sederhana serta dipatuhinya SOP oleh para penyelenggara. Faktor Pendukung yang ditunjukkan dengan adanya kerja sama dan koordinasi yang baik, Faktor Penghambat yang terjadi yaitu adanya keterlambatan distribusi dan penurunan kualitas makanan pada tahap awal. Tetapi dari hal Faktor Penghambat yang telah menunjukkan bahwa segala kendala sudah diatasi secara optimal oleh para pelaksana tetapi masih perlunya untuk meningkatkan kinerja para pelaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

* Corresponding author: aliviadebiyusnanda@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tantangan utama yang dihadapi, sebagaimana yang dihadapi oleh Negara lain, khususnya Negara berkembang, yaitu masalah pengangguran yang tidak hanya mempengaruhi individu tetapi juga berdampak luas pada kehidupan. Pengangguran merupakan suatu masalah yang memiliki dampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mencapai 4,91%, dengan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 144,64 juta orang. Hal ini karena keterbatasan ekonomi yang menyebabkan sebagian keluarga sulit untuk menyediakan makanan yang cukup dan bergizi kepada anggota keluarganya, terutama kepada anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Akibatnya, anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan beresiko kekurangan asupan nutrisi penting. Pemenuhan gizi anak sangat dipengaruhi oleh ketahanan pangan keluarga. Kondisi ini dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik anak, perkembangan kognitif, serta daya tahan tubuh anak. Ketika akses terhadap asupan gizi tidak terpenuhi secara berkelanjutan, masalah gizi pada anak menjadi tantangan serius yang berdampak pada kualitas kesehatan dan masa depan anak. (Badan Pusat Statistik, 2024)

Asupan gizi yang tidak terpenuhi menjadi faktor yang mengakibatkan kualitas kesehatan yang rendah. Asupan gizi memiliki peranan yang sangat penting dan memerlukan perhatian yang lebih dalam mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak secara optimal. Kekurangan gizi yang sering kali disebabkan oleh pola makan yang tidak seimbang atau keterbatasan akses terhadap sumber nutrisi dapat menghambat proses tumbuh kembang anak seperti peningkatan tinggi badan, berat badan dan meningkatkan kerentanan terhadap berbagai penyakit yang dapat memperlambat perkembangan mereka. Pemenuhan kebutuhan gizi yang optimal berkontribusi besar terhadap pencapaian pertumbuhan yang maksimal, termasuk perkembangan otak anak.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Pemerintahan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 83 Tahun 2024 tentang pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN), yang merupakan sebuah lembaga Pemerintah yang berada di bawah naungan langsung Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Gizi Nasional memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya kecukupan gizi masyarakat Indonesia. Presiden dan Wakil presiden juga memiliki program untuk menyediakan Makan Bergizi Gratis kepada masyarakat Indonesia terkhusus kepada pelajar Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Janji ini merupakan bagian penting dari program mereka yang disebut "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" dan merupakan bagian penting dari visi misi dan program mereka (Bahri ZR. 2025:1). Program Makan Bergizi Gratis tersebut telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2024 untuk memenuhi kebutuhan gizi serta memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan juga mengurangi nilai angka stunting pada anak yang sedang bertumbuh. (Perpres No. 83 Tahun 2024).

Sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi stunting dan malnutrisi di Indonesia, Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai secara resmi di berbagai wilayah pada 6 Januari 2025. Program ini memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah. Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 31 provinsi di seluruh Indonesia, menunjukkan komitmen nasional untuk memastikan akses gizi merata di seluruh negeri, terutama di daerah dengan tingkat malnutrisi tinggi seperti yang dilaporkan dalam survei kesehatan gizi nasional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan perkembangan anak melalui asupan

nutrisi yang seimbang, yang mencakup protein, karbohidrat, dan sayuran. (Febryanti, dkk. 2025:68)

Samarinda, sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur, menghadapi tantangan serius terkait malnutrisi pada anak, yang merupakan kondisi kekurangan nutrisi kronis yang dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak-anak. Berdasarkan data dari instansi kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017, sebanyak 30,6% balita (anak di bawah lima tahun) di wilayah tersebut mengalami malnutrisi, sementara di Kota Samarinda khususnya, angka tersebut mencapai 28,8% untuk anak di bawah lima tahun. Meskipun kota-kota seperti Samarinda dan Balikpapan memiliki infrastruktur yang lebih baik, termasuk akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan, data terbaru menunjukkan bahwa angka stunting yaitu kondisi gagal tumbuh akibat malnutrisi kronis masih tinggi, Samarinda 21% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan gizi anak dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu berkorelasi dengan urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi, karena faktor-faktor seperti pola makan yang tidak seimbang, akses terbatas ke makanan bergizi, serta masalah sanitasi dan pendidikan kesehatan masih menjadi penghalang utama, meskipun di daerah perkotaan. (Hasanah, dkk. 2025:403)

Kalimantan Timur termasuk yang telah menerapkan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG). Ibukota Samarinda dipilih sebagai salah satu provinsi penerima manfaat kebijakan ini karena masalah malnutrisi yang persisten di wilayah tersebut. SD Negeri 008 Samarinda, yang terletak di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu lembaga pendidikan yang dipilih untuk menerapkan kebijakan ini di mana siswa akan menerima makanan sehat secara gratis yang memenuhi gizi kesehatan anak. Untuk memastikan keberlanjutan program dan dampak positif terhadap kesehatan anak-anak, implementasi ini diharapkan dapat menjadi model bagi sekolah-sekolah lain, dengan melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah, sekolah, dan penyedia makanan.

Selain itu, permasalahan lain yang turut mempengaruhi pelaksanaan dari program Makan Bergizi Gratis ini yaitu terkait ketentuan anggaran. Pemerintah pusat melalui kebijakan nasional telah menetapkan standar biaya sebesar Rp.10.000 per porsi. Namun, realitas harga pangan dan bahan makanan di setiap daerah tidak sama, dan berdasarkan Permendagri No.14 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menginstruksikan Pemerintah Daerah (PEMDA) untuk mengalokasikan dukungan anggaran melalui APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyesuaikan dengan kemampuan daerah. Maka dari itu, Pemerintah Kota Samarinda telah mengalokasikan standar biaya sebesar Rp.15.000 per porsi untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan yang memadai dan menjaga kualitas gizi yang diberikan kepada siswa. Perbedaan ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi pelaksana program, terutama dalam menyesuaikan pengadaan bahan agar tetap sesuai dengan standar gizi, kualitas, dan anggaran yang telah ditentukan, baik oleh pusat maupun daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam pelaksanaan Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 008 Kota Samarinda melalui pengumpulan data langsung yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut Mulyana dalam Fiantika (2008:4) menjelaskan studi kualitatif sebagai

studi ilmiah untuk menunjukkan suatu peristiwa dengan menjelaskan data dan fakta dengan kata-kata terhadap subjek penelitian secara menyeluruh.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai sumber data utama dalam penulisan skripsi. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa yang menjadi subyek peneliti memiliki pengetahuan dan informasi yang relevan serta berkualitas dalam penerapan implementasi kebijakan dalam Program Makan Bergizi Gratis di SD Negeri 008 Kota Samarinda. Adapun subyek penelitian dalam tulisan ini terdiri dari key informan dan informan yaitu:

Tabel Data Key Informan dan Informan Pendukung

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Husein S.Pd	Kepala Sekolah	Key Informan
2.	Emilia Tanti Istiqomah S.E	SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	Key Informan
3.	Mastang S.Pd	Koordinator MBG	Key Informan
4.	Susi	Wali Murid	Informan
5.	Syafira & Iqbal	Siswa/Siswi	Informan

Sumber: Data diolah oleh Penulis 2025

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Implementasi kebijakan pemerintah merupakan salah satu tahapan penting dalam rangka mewujudkan tujuan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan. Salah satu kebijakan pemerintah yang saat ini menjadi perhatian adalah Program Makan Bergizi Gratis yang ditujukan untuk meningkatkan status gizi, kesehatan, serta konsentrasi belajar peserta didik di tingkat sekolah dasar. Maka dari itu upaya dalam penerapan kebijakan pemerintah ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan dan dikaji lebih dalam Program Makan Bergizi Gratis di SD Negeri 008 Kota Samarinda.

Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis ini dianalisis dengan merujuk pada teori implementasi kebijakan menurut Edwards III, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat Indikator utama yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Keempat indikator tersebut digunakan sebagai fokus analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan Program Makan Bergizi Gratis telah diimplementasikan secara efektif di SD Negeri 008 Kota Samarinda, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pada fokus penelitian yang peneliti gunakan.

Komunikasi

Dalam implementasi kebijakan komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan serta kepada kelompok sasaran. Komunikasi yang baik sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan, karena melalui komunikasi yang efektif para pelaksana dapat memahami maksud dan tujuan serta prosedur pelaksanaan kebijakan Makan Bergizi Gratis ini. Selain itu, komunikasi juga menjadi sasaran koordinasi antar pelaksana agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Husein S.Pd, Selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 008 Kota Samarinda mengenai pelaksanaan komunikasi dalam implementasi kebijakan MBG ini, sebagai berikut:

"informasi secara umum kita dengarkan dari media, secara khususnya informasi yang sampai ke sekolah dan akan sekolah dapatkan itu berasal dari kelurahan setempat dengan melalui BABINSA, informasi yang disampaikan beberapa kali untuk memproses data dan kurang lebih 3x pendataan itu di proses baru setelah itu pihak sekolah mendapatkan MBG ini. Selaku Kepala Sekolah, setelah mendapatkan informasi bahwa akan adanya Program ini saya sampaikan secara berantai, perorangan dan melalui rapat juga, sampai kepada orang tua informasi itu kami sampaikan melalui MPLS atau penerimaan murid baru, kami sampaikan sejak awal bahwa Insya Allah sekolah akan dapat Program Makan Bergizi ini akan membantu mungkin dapat meringankan beban orangtua, tidak perlu memikirkan sarapan karena sudah mendapatkan MBG ini. Selain itu, kalau sekolah ini sudah tidak menyediakan kantin karena untuk menghindari banyaknya sampah akan terjadi. Untuk kendala atau kesalahpahaman kami pernah terjadi, seperti terkadang kami lupa ketika kami memiliki kegiatan yang mengharuskan siswa dan siswi melakukan pembelajaran di rumah kami lupa menyampaikan informasi tersebut dan MBG tersebut tetap memberikan kepada pihak sekolah, dan untuk saat ini itu saja yang pernah terjadi kendala atau kesalahpahaman komunikasi."

Dari hasil wawancara diatas yang diperoleh peneliti bahwa SD Negeri 008 Kota Samarinda, memiliki jalur komunikasi dalam pelaksanaan Program MBG ini dilakukan secara berjenjang dan berjalan secara struktur kepada semua pelaksana kebijakan Program MBG yang terlibat.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh perencanaan dan komunikasi kebijakan yang baik, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya yang tersedia. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia dan sumber daya keuangan serta sumber daya pendukung. Sumber daya manusia berkaitan dengan kemampuan, jumlah, serta koordinasi para pelaksana program, sedangkan sumber daya keuangan berkaitan dengan ketersediaan anggaran untuk mendukung pengadaan, distribusi, dan pengawasan pelaksanaan program dan sumber daya pendukung dalam bentuk sarana dan

prasana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan seperti peralatan, perlengkapan dan sarana pendukung lainnya. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, tujuan Program MBG tidak dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Husein S.Pd selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 008 Kota Samarinda, sebagai berikut;

"Alhamdulillah secara keseluruhan cukup memadai, apalagi sekolah kami ini ada 2 shift / 2 waktu ya, untuk area penempatan sementara, halaman yang besar dan bersih, adanya pembagian koordinator untuk mengatur untuk melaksanakan program ini. Fasilitas sekolah yang kami sediakan untuk pelaksanaan program ini kami ada untuk penerima/penyimpanan sementara, kebetulan karena kantin di sekolah ini sudah tidak ada jadi itulah yang kami jadikan untuk penempatan sementara. Kalau dukungan anggaran dari pemerintah terkait itu ada untuk pengelola yaitu sebesar Rp.50.000/hari. Sebenarnya tidak ada secara khusus untuk diberikan kepada koordinator program MBG tetapi dari pihak sekolah memang yang memberikan untuk koordinator MBG di sekolah ini dikarenakan sudah mengatur banyak dan membantu dalam pelaksanaan program ini jadi anggaran tersebut diberikan kepada pihak sekolah dan pihak sekolah yang memberikan kepada koordinator MBG di sekolah ini."

Dari hasil wawancara diatas yang diperoleh peneliti bahwa dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SD Negeri 008 Kota Samarinda telah didukung oleh kesiapan sumber daya manusia, fasilitas, serta pengelolaan anggaran yang cukup memadai.

Disposisi

Disposisi pada implementasi kebijakan program ini yaitu merupakan dari sikap, sifat, dan karakter dasar implementor, termasuk pemahaman terhadap kebijakan, komitmen, kejujuran dan sikap demokratis yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi yang baik dapat memudahkan pelaksana menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan pembuat kebijakan, sedangkan disposisi yang kurang sejalan dengan tujuan dapat menimbulkan hambatan, penyimpangan dan menurunkan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan Program Makan Bergizi Gratis.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Husein S.Pd selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 008 Kota Samarinda, sebagai berikut:

"Sikap dan Komitmen kami, Pertama yaitu tentu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami ikuti baik dari segi penjadwalan kemudian aturan makannya, karena kadang kami punya pilihan ya tetapi karena sudah adanya ketetapan jadi kami ya komitmen aja untuk tetap mengikuti. Ya, seluruh pihak sekolah pastinya menerima dan mendukung pada kebijakan pada program ini, karena sangat terbantu dan kami juga melakukan evaluasi kepada anak-anak terkadang ada menu-menu yang sangat disukai oleh anak-anak dan sebaliknya. Tetapi intinya dengan adanya Program ini sangat membantu dan kami juga menanyakan kepada orang tua dan mereka juga sangat terbantu dengan adanya program ini. Kalau di SOP sekolah kan bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak sesuai dengan program pemerintah yaitu Program Makan Bergizi kami sangat mendukung. Untuk keterlibatan sekolah, saya selaku kepala sekolah membentuk dengan pembagian tugas kepada guru-guru dan mengkoordinir kepada dua orang untuk saling mengatur pelaksanaan program ini di sekolah dan selebihnya kami serahkan kepada wali kelas masing-masing. Setiap wali kelas juga membuat piket untuk pengambilan, pengantaran dan juga tempat untuk makan MBG tersebut, jadi semua pihak disekolah ini terlibat ikut mengawasi dalam pelaksanaan kebijakan program MBG di sekolah ini."

Dari hasil wawancara di atas yang diperoleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi di sekolah telah didukung oleh komitmen dan sikap positif seluruh pihak, keterlibatan guru dan staf, pengawasan gizi makanan yang cukup efektif sehingga program berjalan lancar dan diterima dengan antusias oleh siswa.

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Prosedur operasi standar (SOP) menjadi pedoman penting bagi setiap pelaksana, memastikan konsistensi dan keteraturan tindakan. Ketika dalam Birokrasi memiliki struktur organisasi yang terlalu panjang maka akan menimbulkan birokrasi yang tidak sederhana, mengurangi efektivitas pengawasan, dan membatasi fleksibilitas organisasi dalam menanggapi perubahan. Oleh karena itu, struktur birokrasi yang efektif harus seimbang antara kepatuhan pada prosedur dan kemampuan adaptasi organisasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Husein S.Pd selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 008 Kota Samarinda, sebagai berikut;

"Kalau pembagian tugasnya ya itu tadi, adanya koordinator program MBG ini yaitu dua orang, kemudian wali kelas jadi untuk kelas bawah masih diwakilkan dengan wali kelas dan makannya dikelas masing-masing dan untuk anak kelas atas yaitu dengan adanya perwakilan dari murid disetiap kelas. Untuk SOP yang berlaku pada program ini yaitu : Tujuan dari SOP ini adalah memberikan pedoman pelaksanaan pendistribusian Makanan Bergizi (MBG) agar kegiatan dapat berjalan secara tertib, tepat sasaran, dan sesuai dengan standar kebersihan serta ketentuan yang berlaku di SD Negeri 008 Samarinda Seberang. Ruang lingkup SOP mencakup seluruh kegiatan mulai dari penerimaan, penyimpanan sementara, pendistribusian, hingga pelaporan kegiatan pemberian MBG kepada peserta didik.

Pembahasan Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara lapangan yang didapatkan maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Program Makan Bergizi Gratis di SD Negeri 008 Kota Samarinda mengenai Komunikasi telah sesuai dengan teori Implementasi Kebijakan menurut Edwards III. Dimana dalam penerapan komunikasi para pelaksana dari program tersebut memberikan informasi mengenai kebijakan program MBG disampaikan dengan baik dan sesuai kepada para pelaksana dan kelompok sasaran terdapat koordinasi antara pihak yang terlibat. Pemerintah memberikan informasi tentang program MBG kepada sekolah secara berjenjang melalui Kelurahan dan BABINSA, kemudian Kepala Sekolah menyebarkan informasi tersebut kepada guru, koordinator MBG, dan orang tua serta siswa/siswi melalui rapat, sosialisasi, dan media komunikasi seperti paguyuban wali kelas. Selain itu, pihak SPPG juga melakukan komunikasi melalui proses pengajuan proposal kerja sama, sosialisasi program, dan penyampaian prosedur teknis pelaksanaan program kepada pihak sekolah.

Tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala komunikasi, seperti adanya kelalaian dalam penyampaian informasi kepada pihak SPPG ketika sekolah melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah, dimana distribusi makanan tetap dilakukan oleh pihak SPPG. Kendala ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan belum sepenuhnya konsisten, sehingga masih terdapat potensi terjadinya kesalahpahaman antar pelaksana kebijakan. Maka dari itu, masih diperlukan peningkatan dalam aspek konsistensi komunikasi agar pelaksanaan program

dapat berjalan lebih optimal dan mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam penyampaian informasi.

Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara lapangan yang didapatkan maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Program Makan Bergizi Gratis di SD Negeri 008 Kota Samarinda mengenai Sumber Daya telah memadai dan sesuai dengan teori Implementasi Kebijakan menurut Edwards III. Pelaksanaan pada program ini menunjukkan bahwa program ini telah didukung oleh ketersediaan sumber daya yang cukup memadai, baik dari segi sumber daya manusia, maupun sumber daya pendukung lainnya. Untuk sumber daya manusia, pelaksanaan program ini melibatkan banyak pihak yang memiliki peran masing-masing, seperti Kepala Sekolah, Koordinator MBG, guru, serta relawan dari pihak SPPG yang berjumlah 47 orang dan dibagi menjadi beberapa kelompok mulai dari persiapan, pengolahan, pemorsian, penyajian serta pencucian. Dengan adanya pembagian tugas dan koordinasi antar pelaksana tersebut membantu kelancaran pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di sekolah.

Dari segi fasilitas, pihak sekolah juga telah menyediakan sarana pendukung yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program, seperti area penempatan atau penyimpanan sementara makanan yang memanfaatkan ruang kantin sekolah, serta halaman sekolah yang cukup luas untuk mendukung proses distribusi makanan kepada siswa. Sementara itu, dari segi sumber daya keuangan, program MBG memiliki anggaran sebesar Rp.15.000 per porsi yang mencakup biaya keseluruhan yaitu, Rp.10.000 untuk biaya bahan baku dan Rp5.000 untuk biaya operasional termasuk terdiri dari; listrik, air, gaji, sewa bangunan. Anggaran tersebut telah disesuaikan dengan perhitungan ahli gizi sehingga makanan yang diberikan kepada siswa tetap memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wali murid dan siswa/siswi, kualitas makanan yang diberikan dalam Program MBG ini dinilai cukup baik, bergizi, serta memiliki porsi yang cukup bagi siswa, meskipun dalam awal pelaksanaannya terdapat kendala yaitu mendapatkan makanan yang sudah berubah rasa dan dari pihak sekolah langsung mengkoordinasikan kepada pihak SPPG tetapi sekolah dapat mengatasinya dan mendapatkan SPPG yang baru dan lebih berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya yang ada mampu mendukung pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh penerima program, karena program ini didukung oleh sumber daya manusia yang cukup, fasilitas pendukung yang memadai serta pengelolaan anggaran yang telah diatur secara sistematis. Sumber daya yang cukup ini menjadi salah satu faktor yang dapat memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan dengan baik dan lancar.

Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara lapangan yang didapatkan maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Program Makan Bergizi Gratis di SD Negeri 008 Kota Samarinda terkait dengan Disposisi telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori Implementasi Kebijakan menurut Edwards III. Pelaksanaan program ini menunjukkan bahwa para implementor memiliki sikap, komitmen, dan karakter yang mendukung keberhasilan kebijakan, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Dalam aspek sikap dan komitmen, seluruh pihak sekolah termasuk Kepala Sekolah, Koordinator MBG, Guru serta Staf lainnya menunjukkan dukungan dan penerimaan penuh terhadap program yang sedang dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan oleh kepatuhan yang jelas dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta pembagian tugas dan

koordinasi yang jelas diantara pelaksana. Selain itu, keterlibatan aktif guru dalam membantu siswa, mulai dari pengembalian makanan hingga pengawasan saat makan menunjukkan adanya tanggung jawab dan kepedulian yang tinggi terhadap pelaksanaan program ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan wali murid dan siswa, memberikan tanggapan positif dari orang tua dan siswa juga menjadi indikator yang menunjukkan bahwa disposisi implementor berjalan dengan baik. Antusiasme siswa dalam menerima program serta dukungan dari wali murid menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya diterima oleh pelaksana, tetapi juga diterima oleh sasaran pada program ini. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan cara yang demokratis dan transparansi.

Berdasarkan hal tersebut, Program Makan Bergizi Gratis di SD Negeri 008 Kota Samarinda dapat disimpulkan bahwa dalam indikator Disposisi telah memadai dan dilaksanakan dengan baik, ditandai dengan sikap positif, komitmen tinggi, dan kejujuran dari para pelaksana kebijakan. Kondisi ini telah sesuai dengan konsep disposisi dalam penerapan teori Implementasi Kebijakan menurut Edwards III, yang dimana keberhasilan implementasi pada indikator Disposisi perlu untuk dipertahankan dan terus meningkatkan agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang optimal untuk peningkatan gizi serta kesejahteraan siswa dalam Program Makan Bergizi Gratis di SD Negeri 008 Kota Samarinda.

Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara lapangan menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Program Makan Bergizi di SD Negeri 008 Kota Samarinda terkait dengan Struktur Birokrasi telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori Implementasi Kebijakan menurut Edwards III. Pelaksanaan program ini menunjukkan bahwa struktur organisasi yang dibentuk sudah jelas, tidak berbelit, serta didukung dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program ini bagi para pelaksana untuk mentaatinya, sehingga proses dalam implementasi dapat berjalan secara terarah dan sistematis.

Dalam aspek struktur birokrasi dalam penerapan program pembagian tugas antar pelaksana telah dilakukan dan dibagi secara jelas dan terstruktur. Kepala sekolah berperan sebagai penanggung jawab utama, pihak SPPG (penyedia makanan) bertanggung jawab atas penyediaan makanan sesuai dengan standar gizi, Koordinator MBG bertanggung jawab untuk mengatur jalannya program, Guru Staf lainnya membantu dalam proses pendistribusian dan pengawasan. Pembagian tugas ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang tidak berbelit dan sederhana yang dapat memudahkan koordinasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Selain itu, keberadaan SOP yang jelas dan terstandarisasi yang mengatur seluruh tahapan pelaksanaan, mulai dari persiapan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan pelaporan. Hal ini juga diperkuat dengan adanya mekanisme evaluasi dan pelaporan berkala yang dilakukan oleh pihak sekolah dan juga SPPG.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah, SPPG, Wali Murid serta Siswa menunjukkan bahwa program dilaksanakan dengan konsisten dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, koordinasi yang baik antara pihak sekolah dan SPPG (penyedia makanan) menjadi indikator penting untuk mendukung efektivitas struktur birokrasi, terutama dalam menangani kendala di lapangan seperti kualitas makanan yang sempat mengalami

penurunan. Respon yang cepat dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang ada bersifat fleksibel dan adaptif terhadap situasi yang terjadi.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan, seperti salah satunya perbedaan jadwal sekolah pagi dan siang yang sempat mempengaruhi kualitas makanan yang diberikan kepada siswa kelas siang. Meskipun demikian, masalah tersebut dapat diatasi segera melalui koordinasi yang baik antar pelaksana, sehingga tidak menjadi hambatan yang signifikan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, indikator struktur birokrasi yang ditunjukkan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi di SD Negeri 008 Kota Samarinda telah dipenuhi dengan baik, seperti yang ditunjukkan oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, dan koordinasi yang efektif. Maka dari itu, secara keseluruhan hal tersebut telah sesuai dengan teori Implementasi Kebijakan menurut Edrawds III mampu untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program secara optimal.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara lapangan yang didapatkan maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Program Makan Bergizi Gratis di SD Negeri 008 Kota Samarinda terkait dengan Faktor Pendukung dan Penghambat telah berjalan dengan cukup baik dan dapat diatasi. Pelaksanaan program ini menunjukkan bahwa adanya faktor Pendukung yang kuat mampu membantu kelancaran implementasi kebijakan, meskipun masih terdapat beberapa faktor penghambat yang muncul dalam pelaksanaan di lapangan namun dapat diatasi dengan baik oleh para pelaksana program tersebut.

Dalam hal Faktor Pendukung, kerja sama yang baik antara sekolah, SPPG yang berperan sebagai penyediaan makanan, Relawan, dan dukungan Orang Tua sangat penting untuk keberhasilan program. Adanya koordinasi yang aktif antar pihak terkait dan sikap terbuka terhadap kritik dan masukan menunjukkan komunikasi yang efektif dan hubungan kerja yang harmonis. Selain itu, keterlibatan wali kelas dan koordinator dalam mengatur distribusi makanan secara terstruktur juga memperkuat dalam kelancaran pelaksanaan program. Kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan dan harapan juga ditunjukan oleh dukungan dari siswa dan orang tua yang menerima program Makan Bergizi Gratis ini.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat Faktor Penghambat, yaitu keterlambatan distribusi makanan, kendala dalam perhitungan bahan pangan terutama buah, serta kualitas makanan yang sempat menurun pada awal pelaksanaan program. Selain itu, adanya ketidakjelasan terkait dengan penghentian sementara pada program karena alasan anggaran juga menjadi kendala awal yang menimbulkan pertanyaan di pihak sekolah dan adanya keterlambatan penyampaian informasi dari pihak sekolah kepada pihak SPPG sebagai penyedia makanan. Meskipun demikian, sejumlah masalah tersebut tidak bertahan lama karena upaya perbaikan melalui koordinasi yang baik telah dilakukan. Perbaikan ini termasuk penambahan bahan makanan, perubahan pada sistem perhitungan, dan inovasi dalam manajemen distribusi dan kemasan.

Berdasarkan hal tersebut, Program Makan Bergizi Gratis di SD Negeri 008 Kota Samarinda dapat disimpulkan bahwa dalam indikator Faktor Pendukung dan Penghambat telah cukup memadai, serta hambatan yang ada dapat mengatasi tantangan secara adaptif oleh para pelaksana kebijakan. Berdasarkan kondisi tersebut dapat dinilai bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh faktor utama saja seperti Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana dalam

mengelola hambatan yang muncul di lapangan. Oleh karena itu, keberhasilan dalam mengelola faktor pendukung dan penghambat ini perlu untuk dipertahankan dan terus ditingkatkan agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di SD Negeri 008 Kota Samarinda.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang peneliti kemukakan di bab-bab sebelumnya yaitu mengenai "Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Program Makan Bergizi Gratis di SD Negeri 008 Kota Samarinda". Maka pada bagian akhir skripsi ini peneliti akan mengemukakan kesimpulan dari hasil mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam program Makan Bergizi Gratis pada SD Negeri 008 Kota Samarinda dengan menggunakan indikator Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi, serta Faktor Pendukung dan Penghambat maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti di SD Negeri 008 Kota Samarinda menunjukkan bahwa aspek komunikasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya penyampaian informasi yang dilakukan pemerintah secara berjenjang kepada sekolah kemudian diteruskan kepada Orang Tua, Koordinator MBG, dan siswa melalui sosialisasi, rapat dan juga media komunikasi seperti Paguyuban wali kelas. Selain itu, sekolah dan SPPG sebagai penyedia makanan bekerja sama dengan baik melalui proses kerja sama, sosialisasi program dan penyampaian prosedur teknis pelaksanaan. Hal ini memastikan bahwa informasi yang diterima oleh pelaksana dan tujuan program dapat dipahami dengan jelas dan mendukung kelancaran pelaksanaan program.
2. Sumber Daya dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa komponen Sumber Daya dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis di SD Negeri 008 Kota Samarinda telah memadai yang ditunjukkan oleh ketersediaan sumber daya manusia yang terorganisir dengan baik, fasilitas pendukung yang cukup, serta pengelolaan anggaran yang sistematis. Maka dari itu, kondisi ini mampu mendukung kelancaran pelaksanaan program serta memastikan bahwa manfaat program dapat dirasakan secara langsung oleh siswa sebagai penerima manfaat pada Program Makan Bergizi Gratis tersebut.
3. Disposisi dari hasil penelitian dan wawancara yang diperoleh dapat menunjukkan bahwa dalam hal Disposisi pada Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Program Makan Bergizi Gratis pada SD Negeri 008 Kota Samarinda telah berjalan dengan baik. Sikap positif, memiliki komitmen yang tinggi, serta tanggung jawab para pelaksana menunjukkan bahwa mereka telah berkontribusi pada keberhasilan program. Melalui kepatuhan terhadap prosedur, koordinasi yang baik, serta partisipasi aktif dalam kegiatan program dan seluruh pihak sekolah menunjukkan penerimaan yang baik dalam kebijakan yang telah dijalankan. Selain itu, tanggapan positif dari siswa dan wali murid serta memperkuat bahwa kebijakan ini diterima secara luas oleh pelaksana maupun sasaran program, sehingga tujuan program dapat terwujud sepenuhnya.
4. Struktur Birokrasi dari hasil penelitian dan wawancara yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dalam aspek Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah pada Program Makan Bergizi Gratis di SD Negeri 008 Kota Samarinda telah berjalan secara efektif. Hal ini menunjukkan dengan adanya struktur organisasi yang jelas, sederhana, dan tidak

berbelit, serta didukungnya oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terstandarisasi sebagai pedoman pelaksanaan program dan sesuai dengan teori Implementasi Kebijakan menurut Edwards III yang menyatakan bahwa SOP adalah struktur komponen yang penting dan berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan sebuah program atau tindakan. Pembagian tugas antar pelaksana telah dilakukan secara terstruktur, mulai dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, pihak SPPG bertanggung jawab untuk menyediakan makanan, koordinator program serta guru dan staf sebagai pelaksana teknis di lapangan. Selain itu, adanya mekanisme evaluasi dan pelaporan berkala serta koordinasi yang efektif antar pihak yang menunjukkan bahwa struktur birokrasi mampu untuk mendukung pelaksanaan program secara sistematis, adaptif, dan responsif dalam menghadapi beberapa tantangan yang muncul untuk mencapai tujuan program secara optimal.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat dari hasil penelitian dan wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di SD Negeri 008 Kota Samarinda dalam hal Faktor Pendukung dan Penghambat pada pelaksanaannya yang menunjukkan bahwa kinerja pada implementor yang relatif optimal. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan, termasuk pihak sekolah, SPPG sebagai penyedia makanan, relawan, dan orang tua yang terwujud melalui komunikasi yang berjalan efektif, koordinasi yang terarah dan pengelolaan distribusi yang cukup sistematis. Meskipun dalam pelaksanaannya adanya Faktor penghambat yaitu, seperti keterlambatan distribusi, kesulitan dalam perhitungan bahan pangan, penurunan kualitas makanan pada tahap awal implementasi. Namun, para pelaksana kebijakan dapat mengatasi berbagai tantangan tersebut secara bertahap melalui perbaikan yang cepat dan tepat. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya indikator-indikator utama dalam implementasi kebijakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi dan responsivitas pelaksana dalam menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan yang muncul di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: PUSTAKA SETIA Arafat. (2023). Kebijakan publik: Teori dan praktik.
- Arikunto, S. (2006). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dewi. (2022). Kebijakan publik: Proses, implementasi, dan evaluasi.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). Metodologi penelitian kualitatif.
- Jumroh, & Pratama, M. Y. J. (2021). Implementasi kebijakan publik: Teori dan konsep.
- Kasmad, R. (2018). Implementasi kebijakan publik. Alfabeta.
- Marwiyah. (2022). Kebijakan publik: Administrasi, perumusan, implementasi, pelaksanaan, analisis, dan evaluasi kebijakan publik.
- Pramono. J. (2020). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Unisri Press Raco, J. C. (2010). Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik, dan keunggulannya. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tlijten, A. P. (2019). Konsep, teori, dan teknik analisis implementasi kebijakan publik.

Jurnal:

- Febryanti, I., Indiaty, I., Pane, M. A., & Astuti, P. (2025). Implementasi kebijakan makan bergizi gratis (MBG) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Studi pada SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang). *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 67–79.
- Hasanah, A. U., Yuwardani, Y., Risqillah, A. R. D., Sihombing, E. M., Pasqua, V. D., Almi, I. A. S., & Wisnuwardani, R. W. (2025). Edukasi dan evaluasi kondisi gizi remaja di SMA Negeri 11 Samarinda. *Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 402–411.
- Lubis, D. S. (2017). Analisis pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 3(2), 180–206.
- Maharaksa, M. S., Triharjono, H. D., Fadilah, F., Kania, S. A. Z., Firda, S. M., & Hidayat, Z. A. (2025). Implementasi kebijakan publik: Pengertian, model-model, dan penerapannya dalam studi kasus.
- Mamonto, N., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). Implementasi pembangunan infrastruktur desa dalam penggunaan dana desa tahun 2017 (studi Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan).
- Ponto, A. M., Pioh, N. R., & Tasik, F. (2016). Implementasi kebijakan program pembangunan berbasis lingkungan: pembangunan prasarana fisik, sosial, dan ekonomi di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado.
- Prafitasari, A. (2016). Organisasi Kepemudaan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi.
- Roring, A. D., Mantiri, M. S., & Lopian, M. T. Implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan virus Corona (Covid-19) di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.
- Tambunan, K. A. H., Nababan, R., Siagian, R. A., Naiborhu, R., Harianti, S., & Jamaludin, J. (2025). Tinjauan Kritis Tentang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Produktivitas Belajar Siswa. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika*, 2(2), 21-31.
- Zulfiani, E., & Fuadah, L. L. (2023). Peran gizi dan ahli gizi dalam upaya pembangunan nasional di Indonesia. *Jurnal Sehat Indonesia (JUSINDO)*, 6(1), 211–217.

Website:

- Badan Pusat Statistik. (2024). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan rata-rata upah buruh Indonesia.
- KBBI Daring. 2016 Entri 'Kebijakan' dan 'Publik'.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/publik>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). Indonesia masih menghadapi gizi buruk, saatnya peduli pada asupan yang tepat.
- Nusantaraterkini. (2025, December 3). Realisasi anggaran MBG di Kaltim capai Rp42 miliar, operasional di lapangan terus dioptimalkan.
- World Health Organization. (2023). Joint child malnutrition estimates.
- Peraturan Presiden:
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.